



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola TAHUN 2025

PT BPR ARTHA HUDA ABADI

Jl. Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati
Telepon : 0295452436

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2025



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

PT BPR ARTHA HUDA ABADI

Jl. Pati-Tayu, Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati TELEPON: 0295452436

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR ARTHA HUDA ABADI
Alamat	Jl. Pati-Tayu Km. 19 Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati
Nomor Telepon	0295452436

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG-Good Corporate Governance) pada PT BPR Artha Huda Abadi pada tahun 2025 membawa perkembangan positif dan peningkatan kinerja BPR .

PT.BPR Artha Huda Abadi berkomitmen kuat dalam penerapan Tata Kelola sesuai standar tata kelola yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan supaya PT. BPR Artha Huda Abadi mampu terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing khususnya pada sektor perbankan Kabupaten Pati.

Dalam menjalankan operasional perbankan PT.BPR Artha Huda Abadi senantiasa memperhatikan dan menerapkan Prinsip kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Practices) dimana hal ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi PT. BPR Artha Huda Abadi dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang berlaku umum dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip praktik tata kelola seperti Peraturan No. 4/ POJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2022 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Governance Procedure bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan hal penting bagi PT. BPR Artha Huda Abadi dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu:

1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (fairness)

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat

kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Amin Salafuddin, S.E.
	Jabatan	Direktur Utama
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT BPR Artha Huda Abadi; b. Mengelola PT BPR Artha Huda Abadi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Artha Huda Abadi; c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; i. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); j. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); k. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. l. Melaksanakan pedoman dan tata kerja yang meliputi etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. m. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). 		
2.	Nama	Diaul Khaq, M.M.
	Jabatan	Direktur

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:

- a. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS;
- b. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan;
- c. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan;
- d. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI terintegrasi dalam manajemen risiko PT. BPR Artha Huda Abadi secara keseluruhan;
- e. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI.
- f. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Artha Huda Abadi telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas lainnya, dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain;
- g. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Artha Huda Abadi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- h. Mamastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tekrini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- i. Melaporkan kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan PT. BPR Artha Huda Abadi;
- j. Malakukan pengawasan aktif terkait penerapam program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- k. Menetapkan kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- l. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris terkait :

1. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola
 2. Penunjukan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
 3. Penerapan Manajemen Risiko
 4. APU PPT
 5. Temuan Pemeriksaan OJK
 6. Memonitor debitur bermasalah
 7. Temuan Audit Internal
 8. Teknologi Informasi
 9. Melaksanakan saran dan masukan dari hasil evaluasi kinerja perusahaan oleh Dewan Komisaris.
- Nihil

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Jabatan	Komisaris Utama
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none">a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur inti, Debitur terkait, dan debitur bermasalah;d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian UAng (APU) dan Pencegahan Penbanaan Terorisme (PPT);f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;i. Memastikan PE. Audit Intern dan PE. Manajemen Risiko menjalankan tugasnya secara efektif;j. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.	
2.	Nama	H. Ghuftron Halim, S.E., M.M.
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 1. Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategi dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris;
- i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan atas operasional bank dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. Ketentuan Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, telah dilakukan secara konsisten dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan regulasi berdasarkan self assessment dengan nilai 2 predikat "Baik".
2. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali.
3. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan dengan hasil "Peringkat 2 Sehat".

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan aktif berdasarkan laporan yang diterima yaitu :

4. Menelaah hasil audit PE Audit Internal;
5. Memantau tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menelaah Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik;
7. Menelaah Laporan Bulanan, Publikasi, Semesteran dan Laporan Tahunan;
8. Melakukan Pemantauan dan Pelaksanaan Tata Kelola;
9. Melakukan Pemantauan dan Penilaian Manajemen Risiko;

Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris terkait:

10. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola
11. Penunjukkan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
12. Penerapan Manajemen Risiko
13. Kebijakan APU-PPT
14. Temuan Pemeriksaan OJK
15. Laporan Hasil Audit PE Audit Internal
16. Teknologi Informasi
17. Memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan kinerja Direksi

Nihil

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite Tindak Lanjut
Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite: Tidak ada

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:
Tidak Ada

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Amin Salafuddin, S.E.
	Persentase Kepemilikan (%)	2,75

2.	Nama	Dliaul Khaq
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Abdul Ghofaarozin, M.Ed.
	Persentase Kepemilikan (%)	72,57

2.	Nama	H. Ghufron Halim, S.E., M.M.
	Persentase Kepemilikan (%)	18,43

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Amin Salafuddin,SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	0
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

2.	Nama	Dliaul Khaq MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	0
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
---	------

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Nama Kelompok Usaha BPR	0
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	H. Ghufroon Halim, S.E., M.M
	Nama Kelompok Usaha BPR	0
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Amin Salafuddin, S.E.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPRS ARTHA MAS ABADI
	Persentase Kepemilikan (%)	3,53

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR ARTHA MAS ABADI
	Persentase Kepemilikan (%)	58,23

2.	Nama	Ghufron Halim, S.E., M.M.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR ARTHA MAS ABADI
	Persentase Kepemilikan (%)	8,24

3.	Nama	Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. HIKMAH BUANA KRAMAT
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00

4.	Nama	Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. MADU BUANA ABADI
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00

Tidak Ada

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Amin Salafuddin, S.E.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

2.	Nama	Dliaul Khaq, M.M.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

2.	Nama	H. Ghuftron Halim, S.E., M.M.
----	------	-------------------------------

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada, Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak Ada

Tidak Ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Amin Salafuddin, S.E.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

2.	Nama	Dliaul Khaq, M.M.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

2.	Nama	H. Ghufron Halim, S.E., M.M.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada - Tidak Ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak Ada

Tidak Ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.108.450.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp513.350.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp444.850.100
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp172.095.625

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp415.662.500
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp270.337.500

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp63.245.944
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan	Rp0

Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	6,29 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,25 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,15 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,26 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,88 : 1
-------------	----------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	04 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <p>PEMBAHASAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Laporan Kinerja Perusahaan oleh Direksi Penetapan • Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 		
2.	Tanggal Rapat	13 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Direksi 2. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 3. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Manajemen Risiko 4. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan APU-PPT 5. Lain- lain (Tanggapan atas rencana Direksi terkait bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H) 		
3.	Tanggal Rapat	14 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Direksi 2. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 3. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Manajemen Risiko 		
4.	Tanggal Rapat	16 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<p>Topik/Materi Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Direksi 2. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 		

- 3. Tanggapan/Penilaian Pelaksanaan Manajemen Risiko
- 4. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan APU-PPT
- 5. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

5.	Tanggal Rapat	21 November 2026
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Penentuan Kantor Akuntan Publik		

6.	Tanggal Rapat	05 Desember 2026
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Direksi 2. Tanggapan/Penilaian Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 3. Tanggapan/Penilaian Pelaksanaan Manajemen Risiko 4. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan APU-PPT 5. Penetapan Rencana Bisnis Bank 		

Dewan Komisaris PT BPR Artha Huda Abadi secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat berkala guna memastikan arah kebijakan Direksi sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan regulasi yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, seluruh rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan bank dan efisiensi operasional secara keseluruhan.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Abdul Ghofarrozin
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ghufron Halim
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)

0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada	0 kasus

Tahun Sebelumnya	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada	0 kasus

Tahun Sebelumnya	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Tidak Ada

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Abdul Ghofarrozin
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	PSP/ Komisaris Utama
	Nama Pengambil Keputusan	Amin Salafuddin
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Sewa Gedung Kantor Kas Jaken
	Nilai Transaksi	Rp75.000.000

Keterangan:
Tidak ada

2.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Ghufron Halim,S.E.,M.M
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Komisaris/ Pemegang Saham
	Nama Pengambil Keputusan	Amin Salafuddin,SE
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Kredit Pihak Terkait non Kesejahteraan
	Nilai Transaksi	Rp350.000.000
	<p>Keterangan: Kredit tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan kredit tsb tidak berpotensi merugikan/ mengurangi keuntungan BPR</p>	
3.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Yayasan Pesantren Maslakul Huda
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pihak Terafiliasi
	Nama Pengambil Keputusan	Amin Salafuddin,SE
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Sewa Gedung Kantor Pusat BPR Artha Huda Abadi
	Nilai Transaksi	Rp477.000.000
	<p>Keterangan: Komisaris Utama BPR merupakan Ketua Dewa Pembina Yayasan Pesantren Maslakul Huda, dalam hal ini nilai harga sewa mengacu pada harga pasar yang berlaku tidak merugikan perusahaan</p>	

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	16 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia acara

Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Haul Waliyullah Syeikh Ahmad Mutamakkin, kegiatan Bersih Desa di wilayah
	domisili BPR, kegiatan pembangunan Masjid dan santunan yatim piatu
Jumlah (Rp)	Rp16.800.000

2.	Tanggal Pelaksanaan	26 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Acara
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Halaqoh Santri se Jawa Tengah, kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan kegiatan pelatihan mahasiswa
	Jumlah (Rp)	Rp13.935.000

Sebagai bagian dari komitmen Bank untuk tumbuh bersama masyarakat, BPR Artha Huda Abadi senantiasa menyisihkan sebagian dana operasional untuk program sosial, kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Bank dengan pemangku kepentingan di wilayah operasional kami.

Selama periode tahun buku 2025, BPR Artha Huda Abadi berkontribusi dalam kegiatan sosial sebesar Rp. 30.735.000,- . Fokus utama penyaluran dana tahun ini adalah pada kegiatan sosial keagamaan dan bidang pendidikan bagi masyarakat di sekitar kantor BPR. Kami percaya bahwa dukungan sosial ini merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan bisnis Bank.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR ARTHA HUDA ABADI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

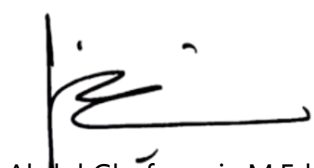
Pati, 15 April 2026
PT BPR ARTHA HUDA ABADI



Amin Salafuddin, S.E.
Direktur Utama




Dliaul Khq, M.M.
Direktur



Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
Komisaris Utama



Ghuftron Halim, S.E., M.M.
Komisaris